



# PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dr.Sutomo No. 53 Telp. (0342) 801243  
E-mail : badan,kesbang@blitarkab.go.id  
B L I T A R

---

### KEPUTUSAN

#### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

#### NOMOR : 19 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

#### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
  2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149) ;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Blitar secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal : 21 Januari 2017

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BLITAR**



**Drs. Ec. AKHMAD HUSAIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601123 198603 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : TAHUN 2017  
TANGGAL : 21 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BLITAR

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Kewaspadaan 2. Kepala Bidang Budaya Politik 3. Kepala Bidang Integrasi

  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BLITAR**  
BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
  
**Drs. Ec. AKHMAD HUSAIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601123 198603 1 010